

Pemilu 1997, Demokratisasi dan Pengawasan Swasta

PEMILU 1997 masih setahun lagi. Tetapi, demamnya sudah mulai menghangat. Tentu ini layak disambut dengan rasa syukur. Ini memberikan ruang dan waktu yang lebih tonggar bagi semua pihak untuk bersiap-siap. Ada alasan lain yang lebih mendasar. Pemilu hendaknya tidak dipisahkan dari kerangka besar pembangunan politik nasional yang kini tenar dengan istilah "demokratisasi".

OPTIMISME BARU?

Pada waktu-waktu yang lampau pemilu berlangsung sangat meriah. Namun, kemeriahan itu berlangsung dalam rentang waktu yang pendek. Sejumlah politikus dan massa pendukung tampil menggebu-gebu. Segera se usai hari pemungutan suara dan penghitungan suara, kehidupan masyarakat berbangsa-bernegara kembali seperti sebelum pemilu. Maka tidak berlebihan jika lama-kelamaan bertumbuh sinisme terhadap "janji-janji pemilu" yang diobral para juru kampanye (jurkam). Semua peristiwa itu dianggap tak lebih dari "festival" tanpa peningkatan kualitas "demokrasi".

Pemilu 1997 ini terasa lebih banyak memikat antusiasme orang. Seakan-akan apatisisme dan sinisme telah digantikan oleh optimisme. Sedikit banyak ini didorong oleh beberapa kejadian penting yang sudah sering dibahas orang di media massa.

Misalnya, yang pertama, pada tingkat elite telah terjadi pergeseran halus aliansi dan friksi baru. Wajar jika ini berbuntut tumbuhnya harapan—dan juga kecemasan yang baru pula. Kedua, di tingkat bawah terjadi pelipatgandaan baik jumlah maupun kualitas kesadaran kaum pekerja industrial kota. Mereka telah sering tampil dalam demonstrasi dan pemogokan. Wilayah gerak mereka masih terbuka pada sejumlah kemungkinan

lain di luar membaca puisi dan berpentas teater.

Ketiga, semakin jelas pertumbuhan kelas menengah kota. Pertumbuhan mereka lama dan lamban, sehingga pada tahun-tahun yang lampau diremehkan pada pengamat yang gegabah, dan tidak sabaran. Berkat suksesnya pembangunan nasional, mereka semakin kuat dengan tuntutan dan kekuatan yang tidak mungkin diremehkan. Bila media massa mereka dibredel, dulu mereka meratap atau memaki. Kini mereka menggugat pemerintah ke pengadilan dan menang. Dulu aktivis nonpemerintah bungkam atau membantah bila kena tuduhan kiri/komunis. Kini mereka menuntut bukti dan mengancam akan menuntut si penuduh di pengadilan.

Semua itu tidak dapat dilepaskan dari perubahan pada tingkat internasional. Yakni, semakin gencarnya proses globalisasi kapitalisme pasca-Perang Dingin. Ini bukan berarti proses global itu akan secara mendikte hasil Pemilu 1997. Proses global itu merangsang lancarnya proses sosial tertentu, sambil menghambat proses sosial yang lain. Semua itu membuka peluang perubahan. Peluang itu akan sia-sia bila tidak disertai dengan dinamika perubahan pada tingkat nasional/lokal.

PENGAWASAN PEMILU OLEH SWASTA

Dengan uraian ringkas itu hendak dikatakan, proses demokratisasi sudah, sedang, dan masih akan terus berlangsung di luar batas-batas kegiatan meriah yang dinamakan pemilu. Bukannya ini lalu berarti, pemilu tidak ada artinya lagi. Justru sebaliknya, pemilu dan demokratisasi mendapatkan ledakan makna yang besar karena saling mengisi dan berpeluk.

Pemilu yang sebelumnya menjadi ritualistik kini mendapatkan momentum penyegaran baru. Ini

Oleh
Ariel Heryanto *

terjadi berkat datangnya angin perubahan sejarah di musim semi demokratisasi sekarang ini. Sebaliknya, angin perubahan yang abstrak itu hanya akan berlalu di udara atau menjadi kasus-kasus kontroversial yang datang silih berganti tanpa membuahkan apa pun bila tidak menemukan pijakan. Salah satu pijakan itu adalah lembaga kehidupan bernegara yang dinamakan pemilu.

Dalam konteks ini layak untuk diamati kegairahan besar yang sedang tumbuh di sejumlah aktivis muda. Bukannya boikot ala golput yang kini sedang menarik perhatian mereka. Bukan pula demonstrasi protes yang sekarang mentok menghadapi demonstrasi tandingan. Yang mereka gandrungi justru keterlibatan untuk membantu suksesnya pemilu dalam bentuk pengawasan swasta.

Emha Ainun Nadjib bertekad mendukung salah satu kontestan Pemilu 1997. Permadi SH menyatakan, dukungan untuk kontestan lainnya. Semua ini sah dan menggembarakan. Apa yang diniati para aktivis muda dengan lembaga pengawasan swasta justru lebih radikal dari semua dukungan untuk salah satu kontestan pemilu.

Para aktivis nonpemerintah ini tidak memperjuangkan kemenangan salah satu kontestan Pemilu, melainkan pranata negara yang dinamakan pemilu itu sendiri. Hanya dengan adanya sukses pemilu seperti yang diperjuangkan para aktivis itu, maka dukungan orang-orang seperti Emha dan Permadi bagi salah satu kontestan pemilu menjadi tidak sia-sia.

Memang benar di Indonesia selama ini pemerintah membentuk panitia resmi mengawasi pelak-

saan pemilu. Ada baiknya kita tidak terburu-buru mencurigai prakarsa dan tawaran para aktivis swasta itu. Ada baiknya kita tidak terburu-buru beranggapan bahwa kerja panitia pengawasan negeri dan pengawasan swasta pasti akan saling bertabrakan, sehingga harus dipilih salah satu. Apalagi bila para aktivis swasta itu menggunakan ukuran/pengertian pemerintah untuk menilai pemilu yang sukses: jujur, adil, bebas, langsung, dan rahasia.

Uluran tangan swasta ini sulit ditolak, baik secara teknis, politis, maupun etis. Secara teknis, betapa arogan besar apabila ada satu pihak yang merasa mampu mengelola pemilu di negara sebesar Indonesia tanpa dukungan pihak-pihak lain. Secara politis, sungguh tragis bila masyarakat swasta hanya diberi peran sebagai tamu atau pemberi suara dalam pemilu. Jauh lebih bijak bila mereka diberi kesempatan ikut repot di dapur mempersiapkan festival demokrasi ini. Secara etis akan tercela (selain mencurigakan) bila ada yang memusuhi warga negara karena ingin menyukseskan prinsip jujur, adil, bebas, langsung, rahasia dalam pemilu.

DEMOKRATISASI, BUKAN SUKSESI

Jelas aspirasi aktivis swasta kita ini konstruktif. Tidak konfrontatif. Bagaimana sebaiknya aspirasi itu ditampung dan dikembangkan secara maksimal? Mungkin belum ada rumusan yang memuaskan semua pihak. Ini menjadi bagian dari prioritas agenda kerja kita semua. Pengalaman dari beberapa negara tetangga layak disimak sebagai sumber inspirasi, jika bukan imitasi.

Kebetulan di awal tahun ini seorang akademikus muda dari Thailand bernama W. Callahan berkunjung ke beberapa kota di Jawa dengan sponsor Yayasan Friedrich Naumann. Ia menyampaikan se-

minar dari hasil penelitiannya tentang pemilu di Thailand dan Filipina, serta sumbangan lembaga swasta dalam bentuk pengawasan pemilu. Beberapa butir diskusi itu layak dicatat di sini.

Partisipasi lembaga swasta dalam pengawasan pemilu di Thailand maupun Filipina sedemikian besar. Hampir sebanding dengan partisipasi rakyat Indonesia pada perayaan ulang tahun proklamasi kemerdekaan di kampung-kampung. Dalam Pemilu 1995 di Thailand tak kurang dari 500 ribu sukarelawan diangkat resmi menjadi tenaga pengawasan. Pemilu 1992 malahan merekrut lebih dari 61 ribu sukarelawan. Undang-undang pemilu melarang setiap pegawai pemerintah untuk berpihak pada salah satu dari kontestan.

Baik di Filipina maupun Thailand, pengawasan pemilu oleh masyarakat swasta punya sejarah yang panjang. Tetapi itu tidak menjamin pemilu di sana berlangsung secara sempurna. Pengawasan oleh lembaga swasta punya sejarah yang panjang. Tetapi itu tidak menjamin pemilu di sana berlangsung secara sempurna. Pengawasan oleh lembaga swasta tak mampu menanggulangi berbagai kecurangan maupun transaksi jual-beli hak suara. Ini bukan berarti pengawasan swasta tidak ada jasanya.

Lembaga pengawasan swasta itu bukan hanya ingin menyempurnakan pemilu. Kerja mereka tidak sebatas mengawasi pencoblosan dan penghitungan suara. Target utama mereka adalah memperluas pendidikan politik bagi rakyat. Mereka membuka forum dialog, konsultasi, *talk show*, dan seminar tentang peran pemilu dalam proses demokratisasi. Kesibukan mereka sudah memuncak jauh sebelum hari pemilu. Dalam kerangka kerja demikian, soal suksesi kepala negara menjadi kurang penting.

* Dr Ariel Heryanto, pernah lama mengajar di UKSW.